



# Panitia Angket Bongkar Konsultan e-Budgeting

SEMENTARA itu, keberadaan tim konsultan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diberi nama Tim 20 akhirnya terbongkar. Ternyata, tim tersebut tidak beranggotakan 20 orang, melainkan hanya empat orang. Hal tersebut terungkap saat panitia Hak Angket DPRD DKI memanggil tim yang disebut-sebut didatangkan dari Surabaya, Jawa Timur tersebut.

Dari empat orang konsultan tersebut, satu-satunya yang hadir saat pemanggilan oleh tim angket bernama Gagat Djiwarno. Kepada tim hak angket, Gagat mengaku sebagai konsultan *e-budgeting*. Dia pun langsung dicecar dengan sejumlah pertanyaan oleh tim Hak Angket DPRD DKI Jakarta.

Gagat, yang merupakan konsultan IT dari Surabaya, seorang diri menghadapi tim hak angket.

Itu terjadi setelah Ketua Tim Hak Angket, Muhammad Ongen Sangaji meminta kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budihartono dan sejumlah jajarannya meninggalkan ruang rapat.

Menurut Gagat, tim *e-budgeting* yang dikabarkan berjumlah 20 orang ternyata hanya isu. Menurut dia, tim konsultan *e-budgeting* jumlahnya hanya empat orang.

"Saya juga tidak tahu darimana ada kabar mengenai 20 orang itu. Tim kami dari awal cuma ada empat orang termasuk saya," ujar Gagat, di dalam ruang sidang Gedung DPRD Jalan Kebon Sirih, yang dibuka untuk umum, Rabu (11/3).

Keberadaan Gagat dan rekan-rekannya, yang dipilih secara perorangan oleh BPKAD DKI Jakarta, membuat tim angket banyak bertanya-tanya. Mereka heran kenapa Gagat bisa langsung dipercaya oleh BPKAD DKI untuk mengurus masalah keuangan daerah yang nilainya sampai puluhan triliun. Belum jelas bagaimana dia bisa masuk sebagai tim *e-budgeting*.

Salah satunya anggota Tim Hak Angket, Maman Firmansyah, yang mempertanyakan bagaimana penunjukan konsultan dilakukan secara sembarangan. Dia mempertanyakan juga bagaimana Gagat yang dari perorangan bisa jadi tim konsultasi *e-budgeting*.

"Saudara Gagat tahu tidak, yang saudara jalankan itu data negara. Lalu bagaimana cara bapak bisa dengan mudah lihat seluruh data? tanya Maman. Menurut Gagat, bila tidak ada izin dia tidak punya wewenang untuk melihat seluruh

data. "Sejak 2015 ini peran saya sangat kecil," ujarnya.

Tim dari Fraksi Partai Hanura, Verry Yennevyll, kembali mempertanyakan bagaimana mungkin Gagat yang berasal dari Surabaya bisa masuk jadi tim konsultasi? Dia juga mempertanyakan kepentingan BPKAD DKI mencari konsultan hingga Surabaya. "Ini bukan perusahaan, bisa mengurus *e-budgeting* puluhan triliun," cetusnya.

Karena itu, tim hak angket meminta Gagat beserta tiga anggota lainnya menyerahkan surat tugas, kontrak kerja, dan bukti tanda terima honor. Ini agar ada bukti bahwa Gagat secara resmi memang dipilih sebagai tim konsultan *e-budgeting*.

Namun yang hadir hanya Gagat sendiri tanpa ketiga rekannya. Gagat adalah ahli dalam bidang IT yang berasal dari Surabaya yang juga merupakan mantan dosen luar biasa (LB) di Universitas Erlangga. "Kami tidak sekuasa yang digambarkan media. Kami hanya menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Kami orang IT bisa saja kalau mau berbuat jahat, tapi kami tidak melakukan hal itu dan tetap berkomitmen pada tugas-tugas kami," cetus Gagat.

Ditambahkan Gagat, dia hanya bertugas sebagai *grand master*, membuat Log In untuk masing-masing SKPD. Setiap masing-masing SKPD katanya ada delapan akun. "Kalau memang kurang kami bisa tambah lagi," tandasnya. (wok)